

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS
IMPLEMENTATION AND HR PERFORMANCE ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS
(CASE STUDY OF THE ENVIRONMENT AGENCY OF NORTH SUMATRA PROVINCE)**

**ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL DAN KINERJA SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Oleh:

Anita Sari¹⁾, Arnida Wahyuni L²⁾

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara – Indonesia

²⁾ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara – Indonesia

Email : sarianita2002@gmail.com¹⁾, arnidawahyuni@yahoo.com²⁾

ABSTRACT

This research was conducted to provide an understanding of the effect of the implementation of government accounting standards on an accrual basis and also to find out how the quality of financial reports on the accountability of HR performance on government finances at the Environmental Service of North Sumatra Province. Researchers used a questionnaire to collect data with a total of respondents as much as 15 responden, and Analysis using qualitative and quantitative methods. Data analysis researchers used multiple regression analysis in knowing the effect on the variables. The hypothesis test used is a statistical test using the SPSS IBBM 22 application. The results of this study indicate that the implementation of government accounting standards on an accrual basis and the quality of financial reports have a positive relationship. In addition, there is a positive influence between the quality of financial reports and HR performance. To further improve the quality of superior human resources, it is necessary to have training and education that prioritizes practice in the field in accordance with the needs of human resources, and it is also necessary to develop financial applications to produce financial reports on an accrual basis.

Keywords: Accrual-Based Government Accounting Standards, Financial Report Accountabilit, HR Performance

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengaruh dari Implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan basis akrual juga untuk mengetahui apakah kinerja SDM akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada keuangan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Peneliti menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data dengan total responden sebanyak 15 responden, dan Analisa menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis data peneliti menggunakan analisis regresi berganda dalam mengetahui pengaruh pada variable. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji statistic test dengan menggunakan aplikasi SPSS IBBM 22. Penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi SAP dengan basis akrual dan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang positif. Peneliti juga mendapatkan hasil bahwa kinerja SDM akan memberikan pengaruh pada kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan. Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang unggul perlu adanya Diklat yang mengutamakan praktek di lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan SDM, dan juga diperlukan adanya perkembangan pada aplikasi keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Akuntabilitas Laporan Keuangan, Kinerja SDM

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan diterbitkannya standar akuntansi pemerintahan (SAP) dengan basis akrual seperti yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah No.71 pada tahun 2010 mengenai SAP menjadi dasar dari UU No.17 tahun 2003 yang berisi negara sebagai isyarat kebijakan pada keuangan untuk menciptakan penyelenggaraan kekuasaan, wewenang pemerintah perihal pengelolaan pemerintahan secara umum dan pembangunan perekonomian yang baik. Salah satu prinsip yang sangat baik untuk terus dikembangkan pada saat ini adalah mengenai prinsip tata manajemen keuangan yang baik. Dalam mencapai manajemen uang dengan baik maka perlu penguatan sistem dan juga kelembagaan berdasarkan peraturan undang-undang dengan standar penyusunan dalam laporan keuangan yang benar dan akuntabilitas.

Dengan diberlakukannya pengelolaan keuangan dengan benar dapat dipastikan hal ini dapat mengubah kinerja pemerintah dalam hal penyajian dalam laporan keuangan. Pencatatan keuangan yang baik atas dasar kinerja akuntabilitas dalam menginformasikan dan juga membuat laporan keuangan. Menurut (Pamungkas, 2012) yang telah diterbitkan dalam jurnal sebelumnya, berdasarkan peraturan undang-undang Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 mengenai akuntabilitas kinerja pada dinas pemerintahan agar memiliki lebih nilai daya guna, berhasil guna, dan juga bertanggung jawab. (Novianti et al., 2018)

Kantor Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara ialah lembaga yang menangani perihal pengelolaan pada lingkungan hidup daerah Provinsi Sumatera Utara dan juga menjalankan tanggung jawab pada pelaksanaan segala tentang lingkungan hidup yang merupakan wewenang provinsi di bidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan, lalu tata pada bahan limbah berbahaya ataupun beracun, penanganan pencemaran lingkungan ataupun juga pada kehancuran lingkungan hidup, peningkatn kapasitas lingkungan hidup yang mengarah dalam Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 yang berisi penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengalihan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utaraserta Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 33 Tahun 2017 tentang tanggung jawab, fungsi, uraian tugas, dan Tata kelola kerja pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Anggaran pada Dinas lingkungan hidup adalah Anggaran yang diperoleh berdasarkan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dengan adanya standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan basis akrual diharapkan akan di implementasikan dengan baik dan juga sesuai arahan oleh dinas pemerintahan, selain itu juga perlu adanya pengawasan yang benar-benar dilakukan dari pihak internal dan juga pihak luar pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dinas pemerintahan dengan

harapan bisa meningkatkan serta mengembangkan mengenai akuntabilitas pada kinerja SDM di kantor dinas pemerintah, dan supaya kinerja segala tugas dan juga tanggung jawab pemerintah dapat berjalan dengan sempurna dan optimal. Selain adanya standard pada akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual serta adanya peningkatan kualitas akuntabilitas serta kinerja dinas pemerintah akan memberikan pengaruh yang baik serta membuat menurunnya tingkat korupsi, dan juga nepotisme untuk menciptakan *good governance* pada pemerintah pusat dan juga daerah Indonesia khususnya Sumatera Utara.

Dengan adanya berbagai praktik korupsi yang terjadi di negara Indonesia oleh beberapa instansi pemerintahan, laporan keuangan yang tidak akuntabilitas atau lainnya pemerintah menerapkan dan menetapkan SAP dengan basis akrual untuk pengelolaan keuangan pada lembaga pemerintahan. Dengan penjabran diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengangkat judul “Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Kinerja SDM Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan” dengan tujuan meninjau sejauh mana dan berapa besar pengaruh sistem akuntansi pemerintah dalam menciptakan akuntabilitas kinerja pada kantor pemerintah dinas lingkungan hidup.

1.2. Rumusan Masalah

Peneliti telah menjabarkan gambaran latar belakang dari penelitian, maka rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Standar akuntansi pemerintah sudah berjalan dengan optimal pada kantor pemerintah Dinas Lingkungan Hidup?
2. Apakah pengimplementasian standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual dan kualitas laporan keuangan memiliki dampak terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah implementasi SAP yang berbasis akrual dan juga kinerja SDM memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis untuk:

1. Memberikan pemahaman ataupun juga pengetahuan kepada pembaca mengenai Standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual yang sudah ditetapkan dan diatur oleh perundang-undangan Republik Indonesia dan bagaimana penerapan SAP di kantor pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup.
2. Dengan tujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pengaruh implementasi SAP basis akrual terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi di Sumatera Utara.
3. Mengetahui ataupun mengkaji pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual dan

juga kinerja SDM terhadap kualitas laporan keuangan kantor Dinas Lingkungan Hidup.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Standard Akuntansi Pemerintahan Basis Akruar

Berdasarkan Rasdinto (2013:10) menyatakan bahwa sistem akuntansi dengan basis akruar ialah akuntansi yang mengakui dan mencaatat segala transaksi ketika terjadi atau saat adanya perolehan. Dapat dikatakan Sistem akuntansi yang satu ini berfokus dengan penghitungan sumber daya yang ekonomis pada suatu entitas, Lembaga atau instansi. (Nasution, 2019)

Kelebihan dalam akuntansi dengan basis akruar adalah setiap informasi yang di dapat akan lebih lengkap ataupun juga sistem ini menyajikan informasi yang jauh lebih lengkap dan juga terperinci perihal aktiva juga kewajiban. Berdasarkan referensi jurnal sebelumnya dalam Lamonisi (2016) Halim dan Kusufi menyimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah dengan bass akruar dapat memenuhi atau melengkapi tujuan dari laporan yang tidak bisa digunakan oleh sistem akuntansi pemerintah dengan basis kas. Adapun beberapa masalah yang akan ditimbulkan oleh aplikasi basis akruar yang dapat di jabarkan lebih lanjut yaitu (Bastian, 2010:120) terdapat pada Lamonisi (2016):

1. Pos sebagai penentuan dan juga jumlah dari transaksi yang akan dicantumkan kedalam jurnal hanya bisa dilakukan oleh individu yang melakukan pencatatan.
2. Dalam sistem akuntansi dengan basis akruar, kesesuaian akruar akan memerlukan alur administrasi yang semakin sulit, sehingga berdampak pada pengeluaran administrasi akan semakin tinggi.
3. Relevansi dengan sistem akuntansi akruar akan terbatas pada saat dihubungkan dengan nilai-nilai inflasi ataupun juga historis.
4. Akan menimbulkan kesempatan pemalsuan pada keuangan yang tidak cukup mudah untuk dikendalikan.

Terdapat beberapa manfaat dari penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akruar diantaranya ialah:

1. Dapat menunjukkan latar belakang yang utuh untuk kedudukan pada keuangan pemerintah.
2. Laporan disajikan dengan jelas dan sebenarnya mengenai kewajiban dan juga hak kantor pemerintahan dinas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara
3. Sangat berguna untuk evaluasi kinerja pemerintah mengenai jasa layanan untuk mencapai tujuan.

Beberapa indikator dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akruar:

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran

3. Pelaporan

2.1.2. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja dalam organisasi ialah gambaran dalam pencapaian dalam melakukan kegiatan ataupun rencana kerja dalam mencapai tujuan dan juga visi, misi dalam perumusan perencanaan yang tepat dalam sebuah perusahaan atau instansi (Sa'diyah & Yuhertiana, 2021)

Selanjutnya Nawaai (2013:14) yang dikutip dari jurnal sebelumnya menjelaskan bahwa kinerja pemerintah yang sesuai dengan tujuan sesuai perencanaan, bukan hanya sekedar menginput atau juga mengoutput namun berorientasi pada hasil pelaporan. Kinerja pada lembaga pemerintahan ditekankan memiliki manfaat atupun efek yang bernilai positif untuk bangsa, maka dari itu anggaran yang telah dikeluarkan memberikan hasil atas kinerja yang sesuai. (Mahardini & Miranti, 2018)

Kantor pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Medan akan dipandang berhasil ketika melakukan tugas dan tanggung jawabnya jika kinerja sesuai dengan misi yang telah direncanakan. Berdasarkan pandangan Mardiasmo (2010: 122) terdapat beberapa manfaat dari pengukuran kinerja yaitu :

1. Dapat memberikan arah dal mencapai tujuan kinerja yang telah di rencanakan atau di tetapkan
2. Untuk mengevaluasi atas pencapaian kinerja serta membandingkan dengan target kinerja yang ingin dicapai dan untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik lagi.
3. Sebagai alat untuk komunikasi antara pimpinan atau atasan dengan bawahan dalam memperbaiki kinerja instansi, lembaga atau organisasi
4. Membantu memahami bagaimana proses dalam kegiatan yang dilakukan dalam instansi pemerintah.
5. Meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan sistem dan perencanaan yang lebih baik lagi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja SDM, diantaranya ialah :

1. Faktor internal dari seorang individu baik itu keterampilan, pengetahuan, dan juga motivasi dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sesuai posisi yang ditetapkan
2. Dorongan dari kepemimpinan. Semakin baik dorongan atau semangat dari pimpinan, maka kinerja SDM akan lebih baik.
3. Aturan yang diterapkan
4. Sistem kerja, meliputi fasilitas kerja yang diberikan oleh instansi untuk menjalankan tugas dan juga tanggung.
5. Faktor yang berasal dari eksternal, meliputi tekanan dan lingkungan kerja

Kinerja SDM yang optimal, dapat meningkatkan kualitas hasil kerja yang bagus. Dalam hal ini kinerja pegawai dinas lingkungan tepatnya pada bagian

keuangan harus menjakankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, mampu meningkatkan kinerja, paham prosedur kerja, dengan itu bakal mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik sesuai aturan pemerintah yang telah putusan.

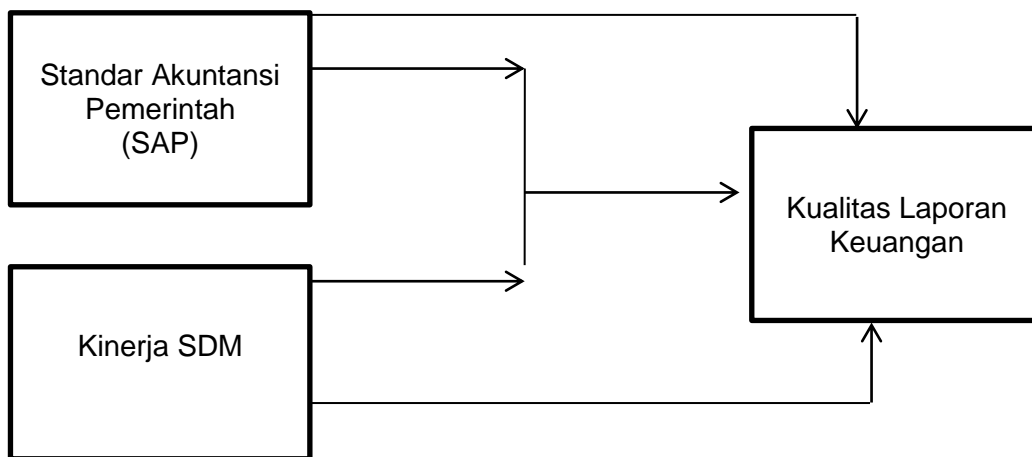
2.1.3. Akuntabilitas kinerja pemerintah

Akuntabilitas kinerja pemerintah bisa di artikan sebagai pelaksanaan kewajiban pada sebuah lembaga pemerintahan dalam memberikan tanggung jawab sebagai kesuksesan maupun kegagalan ketika melakukan misi pada lembaga untuk meraih tujuan yang sudah disetujui melalui alat pertanggungjawaban dengan cara periodik.(Nasution, 2019)

Ketika penerapan akuntabilitas pada lingkungan lembaga pemerintahan juga harus mencermati prinsip-prinsip, diantaranya:

1. Sebuah lembaga pemerintah wajib bisa membuktikan tingkat keberhasilan pada maksud ataupun juga target yang sudah diputuskan.
2. Lembaga pemerintah wajib mempunyai sebuah sistem yang diperoleh untuk mendukung pengaplikasian sumber daya yang ada secara tetap melalui peraturan UU atau hukum yang berlaku.
3. Lembaga pemerintah melakukan pengelolaan misi agar akuntabel.
4. Lembaga pemerintah harus transparan jujur dan juga aktif dalam melakukan pengukuran

2.2. Kerangka Konseptual



Sumber: (Nasution, 2019)

Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan penelitian

Saat melakukan penelitian ini pendekatan yang dipakai oleh penulis yaitu pendekatan secara kausal. Pendekatan kausal dapat diartikan sebagai pendekatan yang dapat dipakai untuk memahami bagaimana sebuah kaitan antara sebab dan juga akibat antara variabel yang akan diteliti yang pada akhirnya membentuk kesimpulan untuk menguraikan Bagaimana pandangan

kinerja sumber daya manusia (SDM) dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Berdasarkan pemikiran Rosjidi (2001) akuntabilitas dikhususkan menjadi dua, yaitu:

1. Akuntabilitas internal, karyawan yang terkait di dalam cakupan internal pemerintah yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seorang atasan mengenai perkembangan kinerja.
2. Akuntabilitas eksternal, dalam hal ini ini pihak eksternal nya yaitu lembaga negara sebagai organisasi yang bertanggung jawab berbagai amanah yang akan diberikan juga mencapai perkembangannya lalu di informasikan bagi pihak eksternal.

Akuntabilitas kinerja pada lembaga pemerintahan juga memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menjadikan lembaga pemerintah yang bersifat akuntabel yang dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan juga efektif terhadap masyarakat dan juga lingkungannya.
2. Menciptakan transparansi pada lembaga pemerintah.
3. Menjaga atau memelihara kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah.
4. Mewujudkan partisipasi masyarakat umum untuk pembangunan nasional di Indonesia.

tentang objek yang akan diteliti.

Saat penelitian ini penulis akan mengkaji Bagaimana kaitan antara variabel yakni variabel implementasi standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Populasi dan sampel

Di penelitian ini populasinya meliputi karyawan atau pekerja pada posisi keuangan yang bertanggung jawab di kantor pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Sebagai sample peneliti menggunakan teknik *random sampling* untuk mengambil sampel dalam penelitian. (Puspitarini et al., 2017)

3.3. Teknik pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pemungutan data yaitu teknik Untuk pengumpulan data bersifat primer maka peneliti menggunakan kuesioner data yang didapat dari metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner mengenai bagaimana pengimplementasian standar akuntansi pemerintah dengan basis akruaI. Bagaimana kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Lalu pengumpulan data secara sekunder peneliti menggunakan metode studi pustaka, yang di mana peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi yang relevan.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisi yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan metode analiss deskriptif, lalu dengan uji Multikolineartas, Uji Autokorelasi, terakhir Koefisien Determinasi

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengamatan dari data keuangan pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, laporan keuangannya terdiri dari: Laporan Realissi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahn Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Data keuangan dimaksud disusun berdasarkan ketetapan standard akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akruaI sebagaimana yang diatur dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai Sandar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tahun 2019 tujuan utama dari pembuatan laporan Keuangan pada instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yakni, menyediakan data tentang keuangan, pengrealisasian anggaran, dan bagaimana kinerja keuangan Kantor Dinas Lingkungan Hidup yang akan sangat berguna untuk pengguna saat menetapkan dan melakukan evaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya secara rinci. Adapun pada tahun 2020 tujuan dari informasi data (laporan) keuangan

pada Instansi Dinas Lingkungan Hidup ialah untuk mengambil keputusan dan juga membuktikan akuntabilitas pada entitas pelaporan dari sumber daya yang dipercaya kedepannya.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah basis yang diterapkan ialah basis akruaI. Basis ini mengakui adanya pendapatan dan beban, lalu pengakuan aset, kewajiban dan juga ekuitas saat proses pencatatan. Selain itu untuk penyajian saat terealisasi anggaran menurut basis yang telah ditetapkan dari peraturan UU tentang anggaran, dengan itu kebijakan pada akuntansi yang menjadi pokok digunakan saat pembentukan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 meliputi: (Rahayu, 2020)

1. Peraturan yang diputuskan Gubernur Sumatera Utara nomor 33 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi berbasis akruaI pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Aturan yang diberlakukan Gubernur Sumatera Utara nomor 34 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi berbasis akruaI pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan hasil dari informasi laporan keuangan anggaran tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan Standard akuntansi pemerintahan dengan basis akruaI dalam melakukan proses pencatatan laporan keuangan, dengan menerapkan sistem akuntansi ini mutu laporan keuangan lebih baik, lalu juga lebih tertata dengan rapi, sehingga akuntabilitas kinerja keuangan lebih baik dan optimal.

4.3. Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan akuntansi Pendapatan-LRA Pendapatan LRA diakui pada saat:
 - a) Sudah diperoleh dari RKUD
 - b) Telah diterima oleh Bendahara penerimaan sampai waktu pelaporan belum diserahkan ke RKUD
2. Kebijakan Akuntansi Beban Beban merupakan penurun nilai guna potensi jasa pada saat periode berjalan yang mengurangi ekuitas, berupa pengeluaran atau timbul adanya kewajiban. Beban diakui ketika:
 - a) Adanya kewajiban
 - b) Terjadinya penggunaan aset
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi

Tabel 1. Pencatatan Laporan Keuangan pada Ppendapatan-LRA dengan Basis AkruaI Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	Persen (%)	Realisasi 2019
1	Pendapatan-LRA	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	123,41	1.763.553.000,00
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	123,41	1.763.553.000,00
3	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	123,41	1.763.553.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	123,41	1.763.553.000,00
Jumlah		1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	123,41	1.763.553.000,00

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2020

Tabel 2. Pencatatan Laporan Keuangan pada Pengeluaran dengan Basis AkruaI Dinas Lingkungan Hidup (Belanja Langsung)

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.604.942.484,00	4.266.309.394,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya, Listrik dan Internet	795.112.000,00	594.342.704,00
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	278.210.000,00	262.010.000,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	189.850.159,00	178.681.400,00
4	Belanja Cinderamata		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggadaan	100.000.000,00	92.514.600,00
6	Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	295.558.923,00	279.913.042,00
7	Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	682.839.704,00	682.711.330,00
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	889.472.090,00	875.810.352,00
9	Penyediaan Jasa Pengaman	802.257.500,00	778.142.816,00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.434.000,00	204.949.000,00
11	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik dan Penerangan Kantor		
12	Penyediaan Jasa Driver/Pengemudi	162.322.608,00	152.846.930,00
13	Penyediaan Makanan dan Makanan	104.287.600,00	84.071.000,00
14	Penyediaan Bahan-bahan Bacaan Kantor dan buku Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	34.258.250,00
15	Publikasi Dinas Lingkungan Hidup	39.998.600,00	26.458.670,00
16	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri		
17	Peningkatan Fungsi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-Pembantu di Dis.LH-SU)	19.599.300,00	19.599.300,00
Jumlah		4.604.942.484,00	4.266.309.394,00

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2020

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah di sebar dan di isi oleh 15 pegawai Dinas Lingkungan Hidup pada

bagian keuangan yang terdiri dari bendahara keuangan, subbag Keuangan, dan staf keuangan pada antor pemerintah Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Utara.

1. Analisis Deskriptif

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi standar akuntansi pemerintah	15	1	1	1.00	.000
Akuntabilitas kinerja keuangan	15	1	4	1.63	1.033
Kualitas laporan keuangan	15	1	2	1.17	.379
Valid N (listwise)	15				

Sumber: Diolah dari Output SmartPLS,2021

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan hasil kuesioner yang disebar dan diisi oleh responden telah valid. Standar yang diberlakukan oleh

penulis menggunakan standar error' 5% (0,5). Jumlah minimum pertanyaan sejumlah 1 dan nilai maksimal pada pertanyaan ialah 4.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-	3.947		
X1	.839	.216	.714	1.400
X2	.507	.173	.714	1.400

a. Dependent Variable: y

Sumber: Diolah dari Output SmartPLS,2021

Peneliti telah melakukan uji multikolinearitas, data yang telah disajikan di atas menunjukkan tidak memiliki variabel independen yang mempunyai besaran VIF > 10 dan nilai

tolerance < 0,1 maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwasanya model ini tidak terdapat multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.704 ^a	.646	.624	3.263187	1.815

a. Predictors : (Constant), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, Akuntabilitas Kinerja keuangan

b. Dependent Variable : Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Diolah dari Output SmartPLS,2021

DW	dL	dU	4-dL	4-dU
1,815	1,232	1,572	2,452	2,321

Berdasarkan pernyataan dari tabel diatas dengan Model Summary menunjukkan bahwasanya nominal Durbin-Watson adalah senilai 1,815. di model regresi ini.

Nilai DW berada di tengah dU dan 4-dU (1,572 < 1,815 < 2,452). Dengan itu Dapat disimpulkan tidak ada terdapat Autokorelasi

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.875 ^a	.765	.531	1.774

- a. Predictors: (Constant), Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Akuntabilitas Laporan Keuangan
- b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Diolah dari Output SmartPLS, 2021

Dapat diperhatikan dari uji yang telah dilakukan bahwa tabel diatas mendapat pengaruh dari nilai R square 0,765 (76,5%), besar R square mendekati 1. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh nilai variabel implementasi standar akuntansi pemerintah dan juga akuntabilitas laporan keuangan memiliki hubungan yang besar dengan kualitas laporan keuangan yaitu sebesar 76,5%. Sedangkan 23,5% (hasil pengurangan 100%-76,5%) dipengaruhi variable yang lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Menurut hasil dari uji analisis dengan deskriptif terbukti bahwa kuesioner yang telah disebar kepada pegawai terkait pada bidang keuangan telah valid. Semua pertanyaan yang diberikan kepada pegawai keuangan keseluruhan diisi.
2. Hasil dari analisis diatas menunjukkan bahwa pengimplementasian standar akuntansi pemerintah dengan basis akrua memiliki hasil yang positif dengan kualitas laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
3. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, akuntabilitas laporan keuangan juga berpengaruh positif kepada kualitas laporan keuangan Lembaga Pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

5.2. Saran

1. Peneliti berikutnya, sangat disarankan memperbanyak sampel untuk diambil, karena semakin tinggi sampel yang diambil maka data yang diterima akan lebih valid.
2. Peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk lebih memperluas atau mengembangkan variabel yang akan digunakan nantinya dalam penelitian, sehingga pengetahuan akan semakin luas, dan hasil yang didapatkan akan lebih baik lagi.
3. Pegawai pemerintah harus memahami standar akuntansi pemerintah dengan basis akrua secara baik agar mutu dari kualitas laporan keuangan akan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>

Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 30–43.

Novianti, I., Syamsidar, M., & Syawalina, C. F. (2018). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01), 115–130. <https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1256>

Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141–149. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501>

Rahayu, D. P. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Dan Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(71), 87–96. <http://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma/article/view/683>

Sa'diyah, D. I., & Yuhertiana, I. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Insentif Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Pada Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Kompak: Jurnal Ilmiah ...*, 14(1), 126–140. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/375>